

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN PARIWISATA PADA ERA *NEW NORMAL* DI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL BEDUGUL DAN SEKITARNYA

Nyoman Reni Ariasri¹, Hartanti Woro Susianti^{2*}

¹Program Studi Manajemen Konvensi Perhelatan, Politeknik Pariwisata Bali

²Program Studi Manajemen Kepariwisata, Politeknik Pariwisata Bali
Jl. Dharmawangsa Kampial, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali

¹reniariasri@ppb.ac.id, ^{2*}worosusianti@ppb.ac.id

*corresponding author

Received: February, 2022

Accepted: February, 2022

Published: March, 2022

Abstract

The research aims to investigate community participation in KSPN Bedugul towards tourism recovery efforts. Data was collected by observation, survey and interview using questionnaires and interview guides. The sampling technique used was purposive and snow ball sampling and the data obtained were analyzed using quantitative descriptive analysis techniques and the typology theory of community participation in tourism from Pretty were referred to. The results showed that the overall community participation in the recovery of tourism in the New Normal era at KSPN Bedugul, appears very small (below 50%). Based on the seven levels of participation typology, the level of participation in the Bedugul community from the lowest can be seen as follows: manipulative participation with average value of 0.556 or 27.8%; passive participation (0.546 or 27.3%); participation by consultation (0.563 or 28.1%); participation for material incentives (0.82 or 41%); functional participation (0.293 or 14.6%); interactive participation (0.156 or 7.8%); self-mobilization and connectedness (0.9 or 45%). It is recommended that stakeholders involve the community in tourism recovery efforts, as well as the re-establishment of organizations such as Pokdarwis. It is also necessary to increase public awareness of the meaning of tourism for improving their standard of living.

Keywords: *Bedugul, tourism destination, community's participation, new normal era*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat di KSPN Bedugul terhadap upaya pemulihan pariwisata. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, survei, wawancara, dan studi pustaka dengan menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive dan snow ball sampling dengan jumlah sampel mengacu pada teori Fraenkel & Wallen. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan mengacu pada teori tipologi partisipasi masyarakat dalam pariwisata dari Pretty. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam pemulihan pariwisata di era New Normal di KSPN Bedugul, tampak sangat kecil (dibawah 50%). Berdasarkan tujuh tingkat tipologi partisipasi, tingkat partisipasi masyarakat Bedugul dari

yang terendah dapat dilihat sebagai berikut: partisipasi manipulatif dengan nilai rata-rata 0,556 atau 27,8%; partisipasi pasif (0,546 atau 27,3%); partisipasi melalui konsultasi (0,563 atau 28,1%); partisipasi untuk insentif materi (0,82 atau 41%); partisipasi fungsional (0,293 atau 14,6%); partisipasi interaktif (0,156 atau 7,8%); mobilisasi diri dan keterhubungan (0,9 atau 45%). Disarankan para pemangku kepentingan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemulihan pariwisata, serta dibentuknya kembali organisasi seperti Pokdarwis. Perlu ditingkatkan pula kesadaran masyarakat terhadap arti pariwisata bagi peningkatan taraf kehidupannya.

Kata kunci: KSPN Bedugul, destinasi wisata, partisipasi masyarakat, era normal baru

1. PENDAHULUAN

Wabah *COVID-19* telah dinyatakan sebagai sebuah pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pandemi *COVID-19* ini terjadi di 215 negara di dunia, termasuk Indonesia, berdampak luas dan serius di berbagai sektor kehidupan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, termasuk pariwisata. Kehadirannya menjadi cobaan berat bagi industri pariwisata dunia, tak terkecuali Indonesia dan Bali pada khususnya. Sebelum wabah ini benar-benar berakhir, sulit membayangkan industri pariwisata untuk bisa bangkit kembali. Hal ini dikarenakan industri pariwisata adalah sektor ekonomi yang sangat sensitif terhadap isu keselamatan manusia.

Dampak pandemi *COVID-19* terhadap perekonomian Bali terlihat sangat jelas yaitu terhentinya pariwisata, penurunan pendapatan dari penjualan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, penurunan penjualan hasil pertanian dan kerajinan tangan masyarakat, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) pada triwulan I sebesar -1,14% dan triwulan II sebesar -10,98%. Sebanyak 2.667 pekerja di sektor formal industri pariwisata telah diberhentikan dan 73.631 pekerja sedang cuti tanpa dibayar. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus dilakukan secara bersamaan, pertama pembenahan penanganan *COVID-19*, dimana saat ini pemerintah tengah menggalakkan program CHSE dan Vaksin yang belum semua merata menyentuh masyarakat. Kedua, memulai kegiatan dan upaya pemulihan ekonomi

untuk mata pencaharian masyarakat. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemda/Pemkot sepakat untuk melaksanakan kegiatan masyarakat yang produktif dan aman *COVID-19* secara bertahap, selektif dan terbatas dengan menerapkan protokol tatanan kehidupan era baru (*New Normal*). Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: Tahap satu, sesuai arahan Satgas Percepatan Penanggulangan *COVID-19*, melaksanakan kegiatan terbatas dan selektif untuk lingkup masyarakat lokal Bali. Dimulai pada tanggal 9 Juli 2020 tahap pertama ini mengimplementasi tata kehidupan era baru, yang terbatas pada bidang-bidang berikut: (a) kesehatan; (b) kantor pemerintah; (c) tradisi dan agama; (d) keuangan, industri, perdagangan, logistik, transportasi, koperasi UMKM, pasar tradisional, pasar modern, restoran dan pedagang asongan; (e) pertanian, perkebunan, kelautan / perikanan, dan peternakan; dan (f) pelayanan dan konstruksi. Tahap kedua, melaksanakan kegiatan yang lebih luas termasuk pada sektor pariwisata, namun terbatas pada wisatawan domestik. Tahap ini dimulai pada tanggal 31 Juli 2020. Tahap ketiga yang sedianya akan dimulai pada tanggal 11 September 2020, yakni melaksanakan kegiatan ekstensif di bidang pariwisata, termasuk bagi wisatawan internasional, sudah mengalami penundaan. Pemprov Bali telah menunda pembukaan pulau ini bagi wisatawan asing sampai akhir tahun 2020.

Rencana tahap ketiga untuk membuka pariwisata bagi wisatawan internasional, harus memperhatikan hal-

hal berikut: (a) Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, tentang larangan sementara bagi orang asing masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Pemerintah Indonesia masih menerapkan kebijakan yang melarang warganya pergi ke luar negeri, setidaknya hingga akhir tahun 2020. Selain itu, pemerintah Indonesia belum membuka pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga akhir tahun 2020, karena Indonesia masih dikategorikan sebagai zona merah. Situasi Indonesia yang kurang kondusif tidak memungkinkan wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, termasuk mengunjungi Bali; (c) Negara-negara dunia belum menerapkan kebijakan untuk mengizinkan warganya bepergian ke luar negeri. Beberapa negara bahkan memberlakukan pembatasan ketat terhadap aktivitas warganya karena pandemi *COVID-19* yang terus meningkat dan mengancam kesehatan serta keselamatan warganya. Misalnya Australia yang warganya merupakan pengunjung utama Bali, baru berencana memperbolehkan warganya berwisata pada 2021. Demikian pula untuk negara China, Korea, Jepang dan Eropa; (d) Pada prinsipnya, pemerintah pusat mendukung rencana Pemprov Bali memulihkan pariwisata, dengan membuka pintu masuk wisatawan mancanegara. Namun hal ini membutuhkan kehati-hatian, tidak terburu-buru, dan membutuhkan persiapan yang matang. Pasalnya, posisi Bali sebagai destinasi utama dunia sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat dunia terhadap Indonesia, termasuk Bali. Upaya pemulihan pariwisata Bali tidak boleh gagal, karena akan berdampak buruk bagi citra Indonesia dan Bali di dunia internasional yang akan kontraproduktif dengan inisiatif pemulihan pariwisata. (e) Pemerintah pusat memberikan arahan kepada Pemprov Bali untuk menyempurnakan prosedur, sistem dan

infrastruktur agar upaya pemulihan pariwisata Bali dapat terlaksana dengan baik, dengan tetap menjaga pengendalian pandemi *COVID-19*. Di sisi lain masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi *COVID-19* dengan tatanan baru yang disebut *New Normal*. Tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru, berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini pemerintah juga telah merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, tetapi tetap aman dari *COVID-19*.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bedugul dan Sekitarnya (KSPN Bedugul Dsk) merupakan salah satu dari 11 KSPN yang ada di Bali, yang terdampak pandemi *COVID-19*. Setelah dibukanya pariwisata di Pulau Dewata saat pandemi *COVID-19* pengelola Kawasan ini telah siap mengimplementasikan protokol kesehatan pada tatanan era baru sesuai dengan yang dibuat oleh Kemenparekraf berdasarkan arahan Kementerian Kesehatan dan WHO. Salah satunya adalah dengan melakukan pembatasan kunjungan dan menerapkan program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environment*). Konsep ini tidak terelakkan karena pandemi *COVID-19* telah membuat masyarakat jauh lebih peduli terhadap faktor-faktor kebersihan, kesehatan dan keamanan, termasuk di setiap destinasi wisata.

Pada era *New Normal* ini sebagian masyarakat lokal Bedugul juga berinisiatif untuk membangkitkan kembali pariwisata yang terpuruk. Fenomena masyarakat yang mengalih fungsikan lahan mereka sebagai obyek wisata begitu marak. Mereka membuka kebun sayuran mereka (seperti wortel, paprika, selada, tomat) dan buah (seperti strawberry, sawo Belanda, markisa), menjadikannya obyek untuk dikunjungi wisatawan, dimana wisatawan bisa memetik langsung sayuran atau buah

sendiri. Bentuk usaha yang lain juga dilakukan oleh masyarakat Bedugul dengan membuka lahan mereka sebagai camping area, dengan fasilitas seperti tenda, toilet dan tempat perapian. Sementara masyarakat yang memilih berdagang di pinggir jalan juga semakin banyak. Mereka menjajakan hasil kebunnya seperti strawberry, wortel, tomat dan berbagai makanan oleh-oleh khas Bedugul seperti aneka keripik. Keberhasilan *recovery* pariwisata di KSPN Bedugul membutuhkan kerja sama dan kedisiplinan semua pemangku kepentingan terutama masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi partisipasi masyarakat pelaku pariwisata di KSPN Bedugul terhadap usaha pemulihan pariwisata di wilayah ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subyek, menilai sifat dari kondisi yang terlihat, serta mendeskripsikan karakteristik tersebut sebagaimana adanya. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive* dan *snow ball sampling*. Jumlah sampel 100 orang dengan kriteria masyarakat pelaku pariwisata yang tergolong pada usia produktif (17 - 55 tahun). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner. Sebagai indikator dalam instrumen penelitian, digunakan teori Tipologi partisipasi masyarakat dalam pariwisata dari Pretty (1995) dan Teori dari Angell (1951) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Instrumen pada penelitian ini telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Dengan jumlah responden sebanyak 30 maka nilai *r table* yang didapat melalui tabel *r product moment pearson* dengan taraf signifikansi 5 % adalah 0,361. Hasil

olah data SPSS dari 30 kuisisioner yang telah disebarakan menunjukkan tidak ditemukan indikator yang memiliki nilai korelasi di bawah 0,361 seperti yang disyaratkan sehingga seluruh indikator pada setiap variabel telah dinyatakan valid. Dan dengan kriteria pengambilan keputusan bahwa suatu variabel dinyatakan *reliable* jika nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,60 maka seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan *reliable*, karena telah memiliki nilai Alpha Cronbach yang lebih besar dari 0,6 seperti yang disyaratkan.

3.2 Karakteristik Responden

Pada umumnya masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan berpartisipasi dibandingkan dengan kaum perempuan. Namun pada era *new normal* ini, kaum perempuan di Bedugul telah mengambil peran lebih banyak (61%) dibanding laki-laki (39%) sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian keluarga yang terpuruk akibat pandemi.

Responden dengan rentang usia 30 - 39 tahun mendominasi dengan persentase sebesar 47%. Hal ini sangat sesuai secara teoritis bahwa responden dengan rentang usia 30 - 39 tahun terbelang usia yang produktif dan berada pada kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap. Mereka cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

Responden dalam penelitian ini sudah mempunyai tingkat pendidikan yang memadai, dengan persentase 38% lulusan SMA/K dan 33% sudah menempuh pendidikan tinggi, baik Diploma maupun Sarjana. Sedangkan 29% lainnya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Tingkat Pendidikan ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 37% Responden bekerja sebagai pedagang dan 25% sebagai Petani. Dari hasil observasi, banyak karyawan dan pekerja pariwisata kehilangan pekerjaannya akibat pandemi. Banyak dari mereka beralih profesi menjadi pedagang buah dan sayur, karena dianggap mudah, tidak memerlukan persyaratan khusus dan minim resiko. Menjadi petani juga menjadi pilihan. Mereka membuka lahan yang mereka punya sebagai kebun buah atau sayuran seperti Strawberry dan Paprika, untuk menjadi tempat tujuan wisata petik buah.

Responden dalam penelitian ini memiliki pendapatan perbulan yang terbilang jauh menurun hingga 40%, dibandingkan sebelum adanya pandemi. 60% responden berpenghasilan rata-rata 2 sampai 4 juta rupiah per bulan. Pekerjaan dan penghasilan seseorang yang dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari, dapat mendorong orang tersebut untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Hal ini dapat dimaknai bahwa partisipasi dalam suatu kegiatan membutuhkan dukungan dan suasana yang mapan secara ekonomi.

Sebagian besar masyarakat Bedugul sudah berdomisili lebih dari 20 tahun di kawasan tersebut, yakni mencapai 57%. Sedangkan 28% dari mereka sudah berdomisili lebih dari 10 tahun. Namun secara keseluruhan, partisipasi masyarakat Bedugul pada usaha pemulihan pariwisata di daerahnya nampak sangat kecil, dengan skor rata-rata 0,547 atau setara dengan 27,4%. Hal tersebut disebabkan oleh faktor dominan yang lain, seperti tidak adanya organisasi profesi, dan tidak adanya interaksi dengan pengelola DTW.

3.3 Tipologi Partisipasi Masyarakat KSPN Bedugul

Tipologi partisipasi masyarakat KSPN Bedugul Dsk. dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung skor rata-rata jawaban

responden pada setiap variabel tipologi, kemudian kembali dijabarkan dalam bentuk statistik deskriptif. Ketujuh tipe partisipasi yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tipe Partisipasi Manipulatif dari masyarakat Bedugul yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata 0,557 atau sebesar 27,8%. Nilai tersebut menunjukkan kurangnya partisipasi manipulatif terhadap kegiatan pemulihan pariwisata dari masyarakat Bedugul. Tidak terlibatnya masyarakat Bedugul dalam kegiatan pemulihan pariwisata, disebabkan oleh pengelolaan DTW yang telah diserahkan kepada pihak swasta, seperti Kebun Raya yang dikelola oleh PT. Mitra Natura Raya. Masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai rencana, pengelolaan atau kegiatan-kegiatan pariwisata dan hanya menerima pengumuman-pengumuman sepihak dari pengelola, tanpa dimintai tanggapan. Dengan kata lain, tidak ada interaksi antara masyarakat dan pengelola pariwisata di kawasan wisata Bedugul.

Tipe Partisipasi Pasif yang ada pada masyarakat Bedugul memperoleh nilai 0,547 atau sebesar 27,3%. Masyarakat mendukung apapun kegiatan yang diputuskan oleh pengelola, dan melaksanakan apapun yang diminta atau diarahkan oleh pengelola pariwisata.

Tipe Partisipasi melalui Konsultasi memperoleh nilai 0,563 atau sebesar 28,2% dari masyarakat. Hanya 12% dari responden menyatakan mereka diminta memberi tanggapan atau sekedar menjawab pertanyaan terkait permasalahan yang terjadi pada masa pemulihan pariwisata ini. Namun tanggapan atau masukan tersebut tidak menjadi keharusan untuk ditindak lanjuti. Masyarakat tidak mempunyai peluang untuk memutuskan suatu program atau kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan pemulihan pariwisata.

Tipe Partisipasi untuk Insentif Material ini memperoleh nilai yang

cukup tinggi yakni sebesar 0,82 atau 41%. Untuk mendukung kegiatan pemulihan pariwisata, masyarakat Bedugul ikut terlibat memberikan materi berupa uang/ barang/ lahan. Seperti menyediakan fasilitas sanitasi di tempat-tempat usaha mereka dan membuka lahan mereka sebagai area wisata memetik strawberry atau sayuran sendiri. Mereka merasa tidak perlu mengetahui rencana kegiatan, system pengelolaan atau yang lainnya. Bagi masyarakat Bedugul, hal yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan penghasilan dan dapat ikut serta menikmati hasil sebagai pelaku usaha pariwisata.

Tipe Partisipasi Fungsional memperoleh nilai yang relatif kecil yakni 0,293 atau sebesar 14,7%. Hal tersebut dikarenakan belum adanya organisasi profesi atau organisasi yang bergerak dalam bidang pariwisata seperti Pokdarwis, sehingga belum ada pertemuan-pertemuan, sosialisasi atau bahkan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat setempat terkait pemulihan pariwisata. Pokdarwis yang pernah terbentuk pada masa sebelum pandemi, saat ini sudah tidak berjalan lagi. Pelaku pariwisata seperti *local guide* justru ikut tergabung dengan organisasi profesi yang lebih besar di tempat lain, seperti di Kuta atau Denpasar.

Tipe Partisipasi Interaktif memperoleh nilai rata-rata terkecil dalam penelitian ini, yakni 0,157 atau sebesar 7,8%. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, masyarakat tidak dilibatkan pada rapat-rapat bersama pemerintah, pengelola ataupun lembaga lain tentang pemulihan pariwisata di Bedugul. Mereka tidak berkesempatan memberikan masukan, gagasan atau ide-ide dalam pemulihan pariwisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki hubungan kerjasama dengan pengelola pariwisata di Bedugul.

Analisis terhadap tipe Partisipasi dengan Pengerahan Diri dan keterkaitan menunjukkan nilai rata-rata yang

tertinggi diantara tipe-tipe yang lain yakni 0,9 atau sebesar 45%. Masyarakat Bedugul berinisiatif sendiri dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata tanpa dipengaruhi atau ditekan pihak lain. Mereka berusaha sendiri dan bebas membangun kerjasama dengan lembaga lain, untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang diperlukan.

4. KESIMPULAN

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara menyeluruh terhadap pemulihan pariwisata pada era *New Normal* di KSPN Bedugul tampak sangat kecil (di bawah 50%). Berdasarkan tujuh tingkatan tipologi Partisipasi, tingkatan partisipasi yang ada pada masyarakat Bedugul dari yang terendah sampai yang tertinggi dapat dilihat sebagai berikut: *Manipulative Participation*/ Partisipasi Manipulatif, dengan nilai rata-rata sebesar 0,556 atau sebesar 27,8%. *Passive Participation*/ Partisipasi Pasif, dengan nilai rata-rata 0,546 atau sebesar 27,3%. *Participation by Consultation*/ Partisipasi melalui Konsultasi, dengan nilai rata-rata 0,563 atau sebesar 28,1%. *Participation for Material Incentive*/ Partisipasi untuk Insentif Materiil, dengan nilai rata-rata 0,82 atau sebesar 41%. *Functional Participation*/ Partisipasi Fungsional, dengan nilai rata-rata 0,293 atau sebesar 14,6%. *Interactive Participation*/ Partisipasi Interaktif, dengan nilai rata-rata 0,156 atau sebesar 7,8%. *Self Mobilization and Connectedness*/ Partisipasi dengan Pengerahan diri dan keterkaitan, memperoleh nilai rata-rata 0,9 atau sebesar 45%.

Kurangnya partisipasi dari masyarakat Bedugul terhadap pemulihan pariwisata ini disebabkan oleh ketidakadaannya organisasi profesi atau tata kelola kepariwisataan seperti Pokdarwis yang terlibat dalam penanganan berbagai hal terkait pariwisata. Di samping itu pengelolaan DTW Bedugul

pun diserahkan kepada pihak swasta. Sehingga masyarakat merasa tidak memiliki kepentingan yang terkait pada usaha pemulihan pariwisata. Usaha yang mereka lakukan hanyalah suatu bentuk upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari hasil temuan penelitian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut: 1) Hendaknya para pemangku kepentingan pariwisata di Bedugul mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemulihan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dapat menumbuhkan kepercayaan mereka terhadap suatu program/ proyek pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap proses, dari masa perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan, tentunya dapat menumbuhkan *sense of belonging* masyarakat terhadap program/ proyek tersebut; 2) Hendaknya organisasi seperti Pokdarwis yang telah lama tidak berjalan di Bedugul dibentuk kembali, sebagai sarana interaksi antar pelaku pariwisata, yang dapat membantu terbentuknya suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi masyarakat terhadap pariwisata; 3) Perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat terhadap arti pariwisata bagi peningkatan taraf kehidupannya. Kesadaran masyarakat tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi wisatawan dan mampu meningkatkan citra destinasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menerima manfaat dari kegiatan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aref, F. & Redzuan, M. (2009). Assessing The Level of Community Participation as a Component of Community Capacity Building for Tourism Development. *European Journal of Social Sciences*, 8(1)
- Choi, H. C. & Sirakaya, E. (2006). Sustainable Indicators for Managing Community Tourism. *Tourism Management*, 27, 1275-89
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Huraerah, A. (2011). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan*. Cetakan Kedua. Bandung: Humaniora.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. (2010). *Kode Etik Kepariwisata Dunia*. Jakarta.
- Michael, M. (2009). *Community Involvement and Participation in Tourism Development in Tanzania : A Case Study of Local Communities in Barabarani Village, MtoWambu. Arusha - Tanzania*. Thesis. Wellington : Victoria University of wellington.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pitana, I G. & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pretty, J. (1995) *The Many Interpretations of Participations, Focus* 16:4-5
- Sanchez, M. J. (2009). *Local Participation as a Tool for Tourism Development in La Guajira, Colombia*. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos.
- Soekarno, T. H., dkk. (2019). Sikap dan Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Usaha Pemulihan Pariwisata Pasca Erupsi Gunung Agung. Penelitian Kelompok. Nusa Dua: Poltekpar Bali.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Tosun, C. (1999). *Towards a Typology of Community Participation in the Tourism Development Process*. Bilkent University, Ankara/Turkey.
- Tosun, C. & Timothy, D. J. (2003). *Arguments for community participation in the tourism development process*. *Journal of Tourism Studies*, 14(2), 2-15.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Yoeti, O. A. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Balai Pustaka, Jakarta.